

KOORDINASI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG SEMENTARA MASYARAKAT DI KELURAHAN SUNGAI BELIUNG KOTA PONTIANAK

Oleh:
M. Arief Wibowo
NIM. E42010 007

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 2015
E-mail : ariefger@yahoo.co.id

Abstrak

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui pelaksanaan koordinasi yang dilakukan dalam Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat di Kelurahan Sungai Beliung. Penulisan Skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan yang ditemukan diwilayah Sungai Beliung terkait pelaksanaan yang kurang optimal dalam Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat. Kurang optimalnya pelaksanaan tersebut dikarenakan koordinasi yang terjadi didalam Tim pelaksana masih belum cukup baik, sehingga terjadi berbagai masalah di dalam pelaksanaan Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan dilaksanakan di Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Lembaga yang terkait dalam penelitian ini adalah Kelurahan Sungai Beliung; Kecamatan Pontianak Barat; Kantor Pos Indonesia Cabang Sungai Beliung. Subjek Penelitian ini adalah Kepala Instansi dimana penelitian dilakukan dan pihak yang terkait dan yang dianggap mengetahui masalah ini dengan baik. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa masih kurangnya koordinasi di dalam Tim pelaksana Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat. Setelah dikaji menggunakan unsur unsur pelaksanaan koordinasi James D. Mooney, koordinasi yang terjadi dalam pelaksanaan Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat masih sangat jauh dari unsur unsur tersebut yaitu : susunan yang teratur dari usaha kelompok, kesatuan tindakan dan tujuan bersama.

Kata-kata Kunci : *Koordinasi, Pelaksanaan dan Program*

Abstrack

This thesis is intended to determine the coordination is done in the Direct Assistance Program While at the Village Community Tornado River. Thesis writing is appointed by the problems found in the region associated Tornado River sub-optimal implementation in the Community While the Direct Assistance Program. Less than optimal due to the implementation of the coordination that occurs in the implementation team is still not good enough, causing a variety of problems in the implementation of the Direct Assistance Program While the Society. This study used qualitative research methods and implemented in the Village District of Pontianak West Tornado River City Pontianak in West Kalimantan. Institutions involved in this research is Sungai Tornado; Subdistrict Pontianak West; Indonesian Post Office Branch River Tornado. The research subject is the Head of Institution where research is conducted and the relevant parties and is considered well aware of this problem. The results of this study revealed that there is still a lack of coordination in the implementation team's Direct Aid Program While the Society. Having assessed using the elements of coordination James D. Mooney, coordination occurs in the implementation of the Direct Aid Program While the community is still very far away from the elements, namely: regular arrangement of a group effort, unity of action and common goals

Keywords: *Coordination, Implementation and Program*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Pada era globalisasi ini, semua aspek dalam kehidupan manusia terus berkembang. Sehingga tidak dipungkiri bahwa kebutuhan masyarakat juga semakin bertambah. Bertambahnya kebutuhan masyarakat ini harus di barengi dengan persediaan kebutuhan yang juga harus semakin meningkat. Beberapa kebutuhan pokok masyarakat diantaranya adalah sandang, papan dan pangan. Namun ada beberapa kebutuhan masyarakat yang persediaannya terbatas. Salah satu kebutuhan yang persediaannya terbatas adalah sumber daya alam yang tidak dapat di perbaharui yaitu minyak.

Bahan Bakar Minyak (BBM) telah resmi dinaikan oleh pemerintah, melalui berbagai perdebatan panjang serta pro dan kontra dalam kebijakan itu. Kenaikan BBM ini telah melalui berbagai pertimbangan, tentu saja sebagian masyarakat ada yang setuju dan tidak setuju terhadap kebijakan kenaikan BBM ini. Konsekuensi yang dihadapi pemerintah adalah tidak setujunya masyarakat terhadap kebijakan kenaikan BBM tersebut.

Oleh karena itu berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mencari solusi dan jalan keluar atas permasalahan tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memecahkan masalah tersebut adalah pemerintah mengeluarkan kebijakan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). BLSM sendiri di laksanakan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 dan Instruksi Mendagri No. 541/3150/SJ tanggal 17 Juni 2013 tentang Pelaksanaan Pembagian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan Penanganan Pengaduan Masyarakat.

Apa yang dimaksud BLSM? Dalam praktik kebijakan ekonomi, pemerintah biasanya menerapkan apa yang disebut jaring pengaman sosial atau *social safety net* untuk kelompok masyarakat tertentu, terutama yang secara statistik dianggap miskin, manakala terjadi krisis atau terjadi dampak ekonomi yang negatif atas suatu kebijakan. Tujuan Pemerintah

mengadakan BLSM adalah untuk membantu meringankan kebutuhan ekonomi masyarakat miskin akibat naiknya BBM.

Dalam pelaksanaan program BLSM melibatkan beberapa pihak antara lain Kantor Pos Indonesia, Tim Kesejahteraan Sosial Kecamatan, dan Kelurahan terkait. Ketiga pihak ini mempunyai peran masing-masing dalam mensukseskan program BLSM. Besaran BLSM direncanakan sebesar Rp. 150.000/bulan selama lima bulan. Besar bantuan ini diharapkan dapat membantu Rumah Tangga miskin dan rentan untuk mempertahankan daya beli ketika terjadi kenaikan harga akibat kenaikan harga BBM. Penyaluran BLSM dibagi menjadi 2 (dua) kali penyaluran dengan jadwal sebagai berikut:

1. Pembayaran pertama pada bulan Juni/Juli 2013 sebesar Rp. 450.000.
2. Pembayaran kedua pada bulan September 2013 sebesar Rp. 300.000.

Untuk menerima bantuan ini PT Pos Indonesia ditunjuk untuk membuat dan mendistribusikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Kartu

Perlindungan Sosial adalah salah satu syarat yang harus dimiliki oleh penerima BLSM, apabila tidak memiliki KPS maka rumah tangga tersebut dianggap tidak berhak menerima BLSM. Untuk mensukseskan program ini tentunya dibutuhkan kerjasama dari ketiga lembaga yang berperan tersebut. Karena tanpa adanya kerjasama yang baik, maka program BLSM tidak akan berjalan sesuai keinginan.

Didalam sebuah kelompok kerja tentunya setiap pihak harus berinteraksi untuk menginformasikan kondisi serta situasi yang terjadi agar pihak lain dapat mengantisipasi atau merencanakan langkah apa yang akan diambil selanjutnya. Koordinasi merupakan salah satu bentuk interaksi dan kerjasama dalam sebuah tim atau organisasi. Koordinasi harus dilakukan secara terus menerus agar tidak ada informasi yang terputus dan salah paham. Maka dari itu dalam pelaksanaan program BLSM, koordinasi sangat di butuhkan agar tujuan atau target dari program BLSM dapat tercapai.

Dalam Pelaksanaan BLSM ini Camat merupakan Koordinator yang

bertugas mengkoordinir Lurah sebagai koordinator di wilayahnya, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Petugas Kantor Pos. Lurah sebagai koordinator di wilayahnya bertugas untuk mengkoordinir petugas pos dalam penanganan KPS, Melaksanakan Musyawarah Kelurahan (Muskel) dan Menerbitkan Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM).

Namun semenjak diterapkannya kebijakan program BLSM ini, masyarakat merasakan bahwa pembagian BLSM tidak tepat sasaran atau tidak merata. Banyak sekali keluhan-keluhan masyarakat terkait pembagian BLSM. Salah satu fenomena yang terjadi adalah pembagian BLSM di Provinsi Kalimantan Barat Kota Pontianak tepatnya di Kelurahan Sungai Beliang yang kurang merata.

Dari pemberitaan di Koran Pontianak Post memaparkan bahwa terjadi ketidakmerataan dalam pembagian BLSM di Kelurahan Sungai Beliang. Dan banyak warga miskin yang tidak menerima BLSM. Selain itu masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya program BLSM ini.

Terjadinya ketidakmerataan ini tentunya berkaitan dengan data yang diperoleh oleh Kantor Pos Indonesia dan data yang dimiliki oleh Kelurahan berbeda, yang mengakibatkan kurang meratanya pembagian BLSM kepada masyarakat.

Dalam hal ini dapat dirasakan bahwa koordinasi yang terjadi di antara pihak Kelurahan dan TKSK serta petugas kantor pos masih sangat kurang. Sehingga dalam pelaksanaan pembagian BLSM sendiri banyak warga berhak tidak mendapatkan BLSM. Kelurahan Sungai Beliang merupakan salah satu kelurahan termiskin di Kota Pontianak yakni 14,03 % masyarakatnya terdaftar memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu di Kelurahan. Jumlah ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di Kota Pontianak yaitu 6,15%.

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan di atas penulis tertarik untuk mengangkat fenomena tersebut menjadi sebuah penelitian. Dari pemaparan dan penuturan informan terkait masalah BLSM di atas, dapat dilihat bahwa kesatuan kerja dalam pelaksanaan program BLSM lemah.

Hal ini mengindikasikan bahwa dalam pelaksanaan program BLSM tersebut terjadi kurangnya koordinasi, baik dari Kelurahan maupun dari pihak BPS. Sehingga penulis melakukan penelitian yang berkaitan dengan koordinasi dalam pelaksanaan program BLSM.

2. Fokus Penelitian

Berpedoman dari penjelasan pada latar belakang di atas maka fokus masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai : Koordinasi Dalam Pelaksanaan Program BLSM Khususnya Di Kelurahan Sungai Beliang.

3. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan sebelumnya di latar belakang masalah, maka perumusan masalah ini adalah “Mengapa Koordinasi dalam Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat di Kelurahan Sungai Beliang Kota Pontianak kurang efektif ?”

4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah Untuk mendiskripsikan tentang pelaksanaan

koordinasi dalam program BLSM di Kelurahan Sungai Beliang Kota Pontianak serta untuk mengetahui hambatan apa saja yang menjadi kendala di dalam koordinasi pelaksanaan program BLSM

5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Dari sisi teoritis, Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan ilmu dalam pengkajian khususnya ilmu pemerintahan. Selain itu penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberi kontribusi bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura khususnya Program Studi Ilmu Pemerintahan di bidang Manajemen dan Koordinasi.

2. Secara praktis, Penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan kontribusi dimana penelitian ini dilakukan. Serta dapat memberi sumbangan ide atau gagasan agar tercipta koordinasi yang jauh lebih baik. Dapat dijadikan sebagai alat bantu evaluasi pelaksanaan koordinasi, selain itu dapat menjadi panduan dalam pelaksanaan program yang serupa

yang mungkin dilaksanakan kelompok (orderly arrangement of
kedepannya. group effort) 2. Kesatuan

tindakan (mutual adjusment) 3. Tujuan
Bersama (common purpose)

B. KERANGKA TEORI DAN METODOLOGI

1. Kerangka teori

b. Bantuan Langsung Sementara Masyarakat

a. Koordinasi

Koordinasi diambil dari bahasa Inggris yaitu *coordination* yang menurut kamus berarti *being coordinate*, yaitu adanya koordinat yang bersamaan dari dua garis dalam bidang datar, yang dapat di artikan bahwa dua garis yang berpotongan pada koordinat tertentu. Di dalam organisasi, koordinasi merupakan suatu usaha dari sekelompok orang dalam mensinergikan suatu program agar terjadi suatu kesamaan pemikiran dan tindakan dalam pelaksanaan program atau kegiatan tersebut. Selain itu

Tim Sosialisasi Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak (2013:28), BLSM merupakan bantuan tunai langsung sementara untuk membantu mempertahankan daya beli Rumah Tangga miskin dan rentan agar terlindungi dari dampak kenaikan harga akibat penyesuaian harga BBM. BLSM disalurkan untuk membantu Rumah Tangga miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan hidup Rumah Tangga, pembelian obat-obatan kesehatan, biaya pendidikan dan keperluan-keperluan lainnya.

koordinasi layaknya sebuah mesin di dalam organisasi, dimana dengan adanya koordinasi sebuah organisasi akan menjadi hidup. Untuk itu koordinasi harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. James D. Mooney (dalam Inu Kencana, 2011:33) mengatakan bahwa unsur-unsur koordinasi yaitu sebagai berikut:

Sasaran program BLSM adalah 15,5 juta Rumah Tangga dengan tingkat sosial ekonomi terendah yang terdapat dalam Basis Data Terpadu (BDT) hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011. Besaran BLSM direncanakan sebesar Rp. 150.000/bulan selama lima bulan. Besar bantuan ini diharapkan dapat membantu Rumah Tangga miskin dan

1. Susunan yang teratur dari usaha

rentan untuk mempertahankan daya beli ketika terjadi kenaikan harga akibat kenaikan harga BBM.

2. Metode penelitian

Berdasarkan tujuannya, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif, karena peneliti bertujuan untuk menguraikan atau menggambarkan secara rinci hal-hal yang berkaitan dengan koordinasi dalam pelaksanaan program BLSM di sungai beliang kota pontianak.

Adapun cara yang peneliti gunakan untuk menentukan siapa saja yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik penelitian Purposive. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Peneliti menggunakan dua teknik di atas dengan harapan mendapatkan data yang lebih akurat dan relevan sehingga mampu meminimalisir kesalahan pada data. Observasi dalam penelitian ini diabaikan karena tidak mungkin untuk dilakukan. Selain itu peneliti juga dibantu dengan pedoman wawancara dan dokumen-dokumen yang berkaitan

dengan data baik berupa video, gambar dan sebagainya..

Adapun Selanjutnya teknik yang digunakan dalam menguji keabsahan data pada penelitian ini adalah teknik triangulasi. Adapun triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber, pada triangulasi sumber ini Peneliti melakukan pengecekan data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Dengan ini peneliti bertujuan melakukan *check and recheck* hasil wawancara dengan beberapa informan untuk mengetahui kebenaran data dengan menanyakan pertanyaan yang sama terhadap informan yang berbeda.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Koordinasi Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat.

Berkaitan dengan susunan yang teratur dari usaha kelompok, Tim pelaksana program BLSM masih belum cukup memahami tugas dan fungsinya masing masing, meskipun sudah pembagian tugas sudah cukup jelas tertera di Instruksi Mendagri. Salah satu contohnya adalah saling melempar

tanggung jawab yang nampak sekali terlihat dalam pelaksanaan program BLSM kali ini. Hal tersebut sangat mengganggu jalannya koordinasi yang dilakukan. Karena saling melempar tanggung jawab itulah maka timbul gesekan gesekan antar lembaga sehingga tanggung jawab yang di lempar tidak ada yang mengerjakan.

Belum adanya kesatuan tindakan dari Tim pelaksana BLSM, sehingga masing masing instansi hanya bergerak pada tujuannya masing masing. inilah alasan mengapa perlu adanya rakor dan muskel sebagai media untuk memperjelas tupoksi masing-masing bidang.

Tujuan bersama menjadi sulit untuk dicapai, dikarenakan dua unsur sebelumnya yaitu susunan yang teratur dari usaha kelompok dan kesatuan tindakan tidak terpenuhi.

Koordinasi yang terjadi selama pelaksanaan program BLSM belum optimal. Dengan menggunakan tiga unsur organisasi oleh James D Mooney yaitu susunan usaha yang teratur, kesatuan tindakan, dan tujuan bersama, peneliti melihat masih banyak kekurangan dari tiga unsur tersebut. Lurah selaku koordinator masih belum

mampu untuk mensinergikan seluruh komponen yang terlibat dalam pelaksanaan organisasi. Hal itu berakibat kepada kinerja dari para pihak yang terkait dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Pihak yang terkait bak itu kelurahan, kantor pos maupun TKSK masih bergerak sendiri sendiri dan belum fokus pada satu titik. Pihak-pihak tersebut hanya mengarah pada tugas yang harus di kerjakannya saja. Kendala tersebut tentunya sangat berpengaruh pada hasil atau tujuan yang ingin di capai.

2. Keterbatasan Penelitian

Tentunya dalam melakukan penelitian ini, peneliti menemui beberapa kendala yang mempengaruhi hasil dari penelitian ini. Selain itu ini merupakan penelitian pertama bagi peneliti sehingga tentunya masih banyak terdapat kekliruan dan kesalahan. Untuk tu peneliti sangat mengharapkan bantuan dari rekan rekan peneliti lainnya agar membantu membenahi penelitian ini. Adapun beberapa kendala yang peneliti hadapi selama penelitian adalah :

Kurangnya data dan dokumen yang ada di kelurahan yang merupakan

acuan bagi peneliti untuk mendapat informasi yang valid. Selain itu karena tidak pernah dilakukan rapat koordinasi, tentu berita acara terkait program BLSM tidak ada di kantor kelurahan. Profil kelurahan yang belum lengkap sedikit menghambat penelitian ini karena peneliti harus mengisi sendiri profil kelurahan dan tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama.

Peneliti tidak dapat menemukan dasar hukum utama dalam pelaksanaan program BLSM karena kelurahan sendiri hanya berpatokan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri seperti yang terlampir.

TKSK yang kurang aktif dan tidak berada di kecamatan menjadi salah satu kendala peneliti dalam melakukan wawancara. Karena TKSK bukan seorang pegawai negeri sehingga sering tidak berada di tempat. Selain itu keterbatasan peneliti dalam mengembangkan isi dari hasil wawancara menjadikan penelitian ini terlalu kaku.

Jarak yang cukup jauh dan terlalu banyak instansi yang harus di datangi juga menjadi kendala yang peneliti rasakan. Karena harus pulang

pergi dari satu kantor ke kantor lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku

Handyaningrat, Soewarno. 1992. *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta : Haji Masagung.

-----, Soewarno, 2002, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta : Haji Masagung,

Lembaga Admnistrasi Negara, 2008. *Koordinasi dan Hubungan Kerja*. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara.

Moekijat. 1994. *Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoritis)*. Bandung : Mandar Maju.

Satori, Djam'an., Aan Komariah. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.

Sugandha, Dann. 1988. *Koordinasi, Alat Pemersatu Gerak Administrasi*. Jakarta : Intermedia.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Suryabrata, S. 1983. *Metodologi Penelitian Manajemen*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.

Syafiee, Inu Kencana. 2007. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.

-----, Inu Kencana. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Pustaka Reka Cipta, Bandung.

Tim Penulis Pedoman Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan. 2013. *Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan*. Prodi IP Fisip Untan, Pontianak.

Tim Sosialisasi Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak. 2013. *Buku Pegangan Sosialisasi dan Implementasi Program-Program Kompensasi Kebijakan Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak 2013*. Jakarta : Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia.

Skripsi Dan Tesis

Padagi, Listiana. 2012. *Pelaksanaan Koordinasi Pemerintahan Dalam Melaksanakan Kewenangan Otonomi Desa di Desa Batu Tajam Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang*. (Skripsi). Pontianak : Universitas Tanjungpura.

Rikky. 2013. *Koordinasi Tim Penataan Kegiatan Pengelolaan dan Pengusaha Sarang Burung Walet di Kota Singkawang*. (Skripsi). Pontianak : Universitas Tanjungpura.

Media Online

<<http://ruslanramadhan.wordpress.com/2012/03/21/koordinasi/>>

<<http://wahyu410.wordpress.com/2010/11/07/105/>>

<<http://www.pontianakpost.com/pro-kalbar/pontianak/5379-bps-tolak-disalahkan.html>>

<<http://sitihalihmahfight.blogspot.com/2012/11/v-behaviorurldefaultvmlo.html>>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kode Pos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : M. Arief Wibowo
NIM / Periode lulus : E4 2010 007 / 2014
Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address / HP : Ariefger@yahoo.co.id/ 0852 4771 7337

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**KOORDINASI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG SEMENTARA
MASYARAKAT DI KELURAHAN SUNGAI BELIUNG KOTA PONTIANAK**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- fulltext
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal..... 11/21 Jan 15



Dr. H. Wijaya Kusuma, MA
NIP. 196202141986031001

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 21 Januari 2015

(M. Arief Wibowo)